

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Metode Penelitian.....	15
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	18
<b>BAB II SISTEM PEMBAYARAN PENDAFTARAN SISWA BARU DI SINGAPORE NATIONAL ACADEMY MELANGGAR HAK CALON SISWA SEBAGAI KONSUMEN.....</b>	<b>21</b>
2.1 Kedudukan <i>Singapore National Academy</i> sebagai Pelaku Usaha dan Orang	

Tua Calon Siswa beserta Calon Siswa sebagai Konsumen.....	21
2.2 Hubungan Hukum antara <i>Singapore National Academy</i> sebagai Pelaku Usaha dan Orang Tua Calon Siswa sebagai Konsumen.....	28
2.3 Hak dan Kewajiban Orang Tua Calon Siswa dan Calon Siswa sebagai Konsumen.....	33
2.4 Hak dan Kewajiban <i>Singapore National Academy</i> sebagai Pelaku Usaha di Sektor Pendidikan.....	39
2.5 Hak Konsumen pada Sistem Pembayaran Pendaftaran <i>Singapore National Academy</i> .....	41
2.6 Pelanggaran Hak Konsumen dalam Sistem Pembayaran Pendaftaran <i>Singapore National Academy</i> .....	42
<b>BAB III UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH CALON SISWA SEBAGAI KONSUMEN DARI JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH INTERNASIONAL <i>SINGAPORE NATIONAL ACADEMY</i> ATAS PELANGGARAN HAK KONSUMEN DALAM SISTEM PEMBAYARAN PENDAFTARAN SISWA BARU.....</b>	<b>45</b>
3.1 Dasar Gugatan Sengketa Konsumen.....	45
3.2 Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	55
3.3 Penyelesaian Sengketa melalui BPSK sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Kekuatan Hukum Putusan BPSK.....	58

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran.....	64

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang amandemen Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215)
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607)

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896)
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 291)